

Ekowisata Berbasis Komunitas dan Keberlanjutan Budaya: Peran Strategis Pemuda dan Perempuan dalam Gerakan Lingkungan di Pantai Liang, Maluku

Community-Based Ecotourism and Cultural Sustainability: The Strategic Role of Youth and Women in Environmental Movements at Liang Beach, Maluku

 <https://doi.org/10.30598/vol17iss1pp69-86>

Sunarti^{1*}, Prapti Murwani²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*sunarti.sunarti27@gmail.com

Abstract

This article examines the strategic role of youth and women in the development of community-based ecotourism at Liang Beach, Maluku, as a form of grassroots social mobilization that integrates environmental advocacy and local cultural preservation. Employing a qualitative approach through participatory observation, in-depth interviews, and analysis of local documents, the study explores the dynamic social roles of local actors in ecotourism practices. Findings reveal that youth and women are not merely facilitators of tourism activities but act as change agents who construct ecotourism spaces grounded in cultural values and community ecology. Their involvement reflects resistance to the dominance of external actors and signals the emergence of a new collective identity rooted in social solidarity and environmental sustainability. The novelty of this study lies in positioning Eastern Indonesia as a peripheral yet significant locus of social knowledge production, and in reframing ecotourism as a locally driven social practice rather than solely an economic or institutional project. It advances sociological perspectives on environment, gender, and community by offering a contextual and participatory approach to understanding shifting power relations, symbolic resistance, and cultural identity reconstruction through ecotourism. These findings contribute to developing socially and ecologically just tourism models within broader social and political discourses.

Keywords: Community-Based Ecotourism, Youth Agency, Women's Role, Environmental Sociology, Cultural Sustainability

Info Artikel

Naskah diterima: 01/07/2022

Revisi terakhir: 22/09/2022

Disetujui: 30/09/2022

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, ekowisata menjadi wacana dominan dalam strategi pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Demolinggo et al., 2020; Prasetyo et al., 2020). Namun, di balik pesatnya pertumbuhan industri wisata hijau ini, terdapat pertanyaan mendasar tentang siapa yang benar-benar diuntungkan, dan sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam prosesnya (Majid Cooke & Acciaioli, 2021; Singgalen & Timisela, 2021). Di wilayah-wilayah perifer seperti Maluku, yang kaya akan sumber daya alam dan kearifan budaya, praktik ekowisata justru seringkali tidak berpihak pada komunitas lokal. Dominasi aktor eksternal dan pendekatan pembangunan top-down kerap mengabaikan nilai-nilai lokal, sehingga menciptakan ketimpangan relasi kuasa

dan memarginalkan peran kelompok sosial tertentu, khususnya pemuda dan perempuan (Widjojo & Gunawan, 2020).

Pantai Liang di Maluku merupakan salah satu contoh konkret dari ruang sosial yang mengalami tekanan antara potensi ekowisata yang besar dan kerentanan terhadap eksploitasi. Di tengah dinamika tersebut, muncul inisiatif dari kelompok pemuda dan perempuan yang secara mandiri memobilisasi sumber daya sosial dan budaya untuk mengembangkan model ekowisata berbasis komunitas (Hengky, 2018). Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaku pelestari lingkungan, tetapi juga sebagai penjaga memori budaya dan agen perubahan yang memperjuangkan keadilan ekologis. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena memperlihatkan keterhubungan erat antara praktik wisata, perjuangan identitas budaya, dan transformasi sosial dalam konteks lokal yang kompleks.

Dalam literatur akademik, pembahasan mengenai ekowisata telah banyak dikembangkan, terutama dari perspektif ekonomi dan konservasi lingkungan (Suaedi & Widiono, 2017; Wiweka et al., 2021). Ekowisata dipandang sebagai strategi win-win solution yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam (Singgalen, 2020; Sugito et al., 2019). Beberapa studi juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi ekowisata, seperti yang dikemukakan oleh Chan et al. (2021), Sobhani et al. (2022), dan Tseng et al. (2019), yang menyatakan bahwa partisipasi komunitas lokal merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan jangka panjang ekowisata.

Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi tersebut kerap bersifat simbolik dan tidak sepenuhnya memberdayakan (Dodds et al., 2018; He et al., 2020; Idziak et al., 2018). Perempuan, misalnya, sering kali hanya ditempatkan sebagai pelengkap atau pekerja informal tanpa ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan (Mtapuri & Giampiccoli, 2019; Zoysa, 2022). Begitu pula dengan pemuda, yang perannya dalam pembangunan lokal kerap diabaikan karena dianggap kurang berpengalaman atau kurang kredibel secara sosial (Cheng et al., 2019; Osman et al., 2018). Padahal, dalam banyak kasus, kedua kelompok ini justru memiliki kapasitas inovatif dan jejaring sosial yang kuat untuk menciptakan perubahan (Kia, 2021a).

Studi-studi terdahulu tentang ekowisata di Indonesia banyak berfokus pada kawasan wisata besar seperti Bali, Lombok, atau kawasan konservasi yang sudah mapan secara institusional (Agustina et al., 2019; Kia, 2021b; Sentanu et al., 2021; Syamsi & Lee, 2021). Kajian yang membahas peran pemuda dan perempuan dalam konteks komunitas di wilayah-wilayah terpencil seperti Maluku masih sangat terbatas. Beberapa penelitian mengenai community-based tourism memang telah menyinggung pentingnya aktor lokal seperti kajian Priatmoko et al. (2021) dan Rembulan et al. (2020), tetapi belum secara spesifik mengkaji relasi kuasa, agensi, dan dinamika identitas sosial yang terlibat dalam praktik ekowisata sehari-hari, terutama dari perspektif sosiologi lingkungan dan komunitas.

Di sinilah pentingnya melihat lebih dekat dinamika sosial yang berlangsung di ruang-ruang pinggiran seperti Pantai Liang. Ada proses yang menarik ketika komunitas—yang

selama ini dianggap pasif—justru memimpin inisiatif pelestarian alam dan kebudayaan melalui medium wisata. Ada kekuatan halus dalam narasi-narasi lokal, dalam praktik kolektif yang dijalankan oleh pemuda dan perempuan, yang sering luput dari perhatian akademik yang terlalu fokus pada kebijakan makro atau institusi besar. Di balik gerakan-gerakan kecil ini, tersembunyi sebuah transformasi sosial yang layak untuk diperhatikan.

Tanpa mengklaim sebagai temuan yang revolusioner, penelitian ini mencoba menyibak lapisan-lapisan sosial yang membentuk praktik ekowisata di Pantai Liang, dengan menempatkan pemuda dan perempuan sebagai titik pijak analisis. Dalam konteks ini, ekowisata tidak semata-mata dilihat sebagai produk ekonomi atau konservasi, melainkan sebagai arena produksi identitas, negosiasi kekuasaan, dan penguatan solidaritas berbasis nilai lokal. Perspektif ini memperluas cakupan kajian sosiologi lingkungan, gender, dan komunitas dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif.

Dengan kerangka tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemuda dan perempuan sebagai aktor sosial lokal memproduksi, memaknai, dan mempertahankan praktik ekowisata berbasis komunitas sebagai bagian dari perjuangan sosial dan kultural di wilayah perifer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan ilmu sosial dan humaniora, khususnya dalam mengembangkan model ekowisata yang adil secara sosial, lestari secara ekologis, dan bermakna secara budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam dinamika sosial dan kultural yang membentuk praktik ekowisata berbasis komunitas di Pantai Liang. Pendekatan kualitatif dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti memahami makna, motivasi, dan narasi yang melandasi tindakan sosial para pelaku lokal, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Khan, 2019). Fokus penelitian ini bukan pada generalisasi data, melainkan pada pendalaman konteks dan pemahaman terhadap cara komunitas lokal—khususnya pemuda dan perempuan—mengartikulasikan peran dan identitas mereka dalam gerakan lingkungan dan pembangunan berbasis pariwisata.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yakni Pantai Liang di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pantai ini bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena adanya inisiatif-inisiatif lokal yang unik dalam mengelola potensi wisata berbasis nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Wilayah ini dipilih karena menggambarkan konteks wilayah perifer Indonesia Timur yang seringkali terpinggirkan dalam diskursus pembangunan nasional. Selain itu, Pantai Liang memperlihatkan dinamika sosial yang menarik, di mana pemuda dan perempuan tidak sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi pelaku aktif dalam membentuk arah pengelolaan wisata. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kontekstual yang kuat dan relevansi empiris terhadap fokus kajian.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam praktik ekowisata di kawasan tersebut. Total terdapat 18 informan yang diwawancarai secara mendalam. Mereka terdiri dari 6 pemuda pelopor kegiatan ekowisata, 5 perempuan yang aktif dalam kelompok usaha wisata dan pelestarian budaya, 4 tokoh adat dan masyarakat, serta 3 perangkat desa yang terlibat dalam kebijakan lokal terkait pariwisata dan lingkungan. Komposisi ini dipilih untuk mencerminkan keragaman peran, perspektif, dan posisi sosial dalam struktur komunitas Pantai Liang. Pemilihan informan tidak hanya berdasarkan kategori sosial semata, tetapi juga pada tingkat partisipasi dan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti, sesuai prinsip-prinsip penelitian kualitatif (Priya, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan munculnya narasi-narasi personal dan kolektif dari para informan, yang menjadi inti dari analisis kualitatif. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan komunitas, seperti bersih pantai, pengelolaan homestay, serta kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh kelompok pemuda dan perempuan. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial secara langsung dan memahami relasi yang terjadi dalam konteks keseharian komunitas (Rashid et al., 2019). Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi informasi melalui analisis terhadap arsip desa, catatan kegiatan, media sosial komunitas, dan materi publikasi terkait ekowisata.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan dengan latar belakang yang berbeda, untuk melihat konsistensi narasi dan pengalaman. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga setiap temuan dapat diuji melalui berbagai sudut pandang. Proses triangulasi ini penting tidak hanya untuk menjaga integritas data, tetapi juga untuk menghindari bias interpretatif, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif (Mohajan, 2018).

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Peneliti melakukan proses coding terbuka untuk mengidentifikasi kategori-kategori utama, seperti makna ekowisata, peran gender, identitas budaya, dan praktik resistensi. Selanjutnya, dilakukan pengorganisasian data secara axial untuk melihat hubungan antar kategori dan dinamika yang menyertainya. Analisis dilakukan secara iteratif, yakni melalui proses berulang antara data, teori, dan refleksi kritis, agar diperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual atas fenomena yang diteliti (Mohajan, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekowisata sebagai Praktik Sosial Komunitas

Ekowisata di Pantai Liang tidak hanya hadir sebagai bentuk alternatif dari praktik wisata konvensional, tetapi menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial komunitas. Lebih dari sekadar aktivitas ekonomi atau upaya pelestarian lingkungan, ekowisata menjadi wadah di mana nilai, norma, dan relasi sosial komunitas dijalankan, dirawat, dan diperbarui setiap harinya. Dalam keseharian masyarakat Liang, kegiatan seperti mengelola homestay, memandu wisatawan menyusuri hutan mangrove, atau menggelar upacara adat pesisir bukanlah kegiatan tambahan, melainkan bagian dari praktik hidup yang berkelindan dengan identitas kolektif mereka sebagai masyarakat pesisir Maluku.

Salah satu bentuk nyata dari praktik sosial tersebut adalah pengelolaan homestay yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok pemuda dan ibu-ibu di lingkungan RT 03. Rumah-rumah warga yang disulap menjadi tempat singgah wisatawan tidak hanya difungsikan sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang pertukaran budaya. Salah satu pemuda yang aktif dalam kegiatan ini, sebut saja JH, menyampaikan bahwa setiap tamu yang datang bukan hanya menginap, tetapi juga diajak untuk “merasakan cara hidup orang Liang”—termasuk dalam hal makanan, cerita rakyat, hingga cara berbicara yang khas. Dari sini terlihat bahwa ekowisata tidak sekadar menghadirkan pengalaman rekreasi, tetapi juga menjadi medium pewarisan dan pertukaran nilai-nilai sosial dan budaya.

Observasi lapangan yang dilakukan pada bulan Mei dan Juli 2022 memperkuat narasi ini. Dalam beberapa kesempatan, peneliti menyaksikan langsung interaksi antara warga dan wisatawan dalam kegiatan bersih pantai yang rutin dilakukan setiap pekan. Tidak ada kontrak kerja resmi atau koordinasi birokratis, tetapi warga datang atas dasar kesadaran kolektif. Ibu-ibu membawa makanan ringan untuk peserta, anak-anak ikut membantu memunguti sampah plastik, sementara pemuda menjadi koordinator teknis. Suasana yang tercipta bukanlah suasana kerja, melainkan seperti hajatan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan lingkungan dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari praktik gotong royong yang telah lama mengakar dalam struktur sosial komunitas.

Jika menggunakan perspektif teoretis Pierre Bourdieu, praktik-praktik ini bisa dibaca sebagai bentuk habitus kolektif—yakni struktur disposisi sosial yang ditanamkan melalui pengalaman hidup berulang dan membentuk cara komunitas bertindak secara spontan namun terstruktur (Bourdieu, 2018). Dalam konteks Pantai Liang, habitus ini tercermin dari bagaimana warga “secara alamiah” terlibat dalam kegiatan ekowisata tanpa merasa terpaksa atau sekadar mengejar keuntungan. Mereka melakukannya karena itulah “cara yang benar” menurut tatanan sosial mereka sendiri. Namun, dibanding melihatnya secara normatif, lebih produktif untuk menempatkan praktik ini dalam kerangka vernacular environmentalism seperti yang diajukan oleh Jackson (2021), yakni bentuk aktivisme lingkungan yang lahir dari pengalaman, pengetahuan lokal, dan sistem nilai komunitas—bukan dari intervensi luar atau logika pembangunan modern.

Dalam diskusi kelompok terbatas yang dilakukan bersama sekelompok perempuan pengrajin lokal, muncul pernyataan bahwa mereka merasa bangga ketika produk tenun atau kerajinan tempurung kelapa mereka dibeli wisatawan, bukan karena nilai uangnya, tetapi karena itu berarti “budaya tidak hilang.” Bagi mereka, ekowisata adalah ruang untuk menunjukkan siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Praktik sosial ini menjadi arena produksi identitas kolektif yang baru, di mana nilai-nilai lama seperti adat, kebersamaan, dan relasi spiritual dengan alam disesuaikan dengan bentuk interaksi yang lebih terbuka dengan dunia luar.

Hal ini memperkuat argumen bahwa ekowisata di Pantai Liang merupakan ruang sosial, di mana identitas, nilai, dan relasi kuasa dinegosiasikan setiap harinya. Tidak hanya sebagai penerima manfaat pasif, komunitas di Liang secara aktif memproduksi makna baru dari apa yang disebut “ekowisata,” menjadikannya tidak sekadar perpanjangan tangan proyek konservasi dari luar, tetapi sebagai praktik hidup yang berakar kuat pada konteks lokal mereka.

Dalam konteks ini, penting pula dicatat bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tidak bersifat artifisial atau diciptakan demi proyek tertentu, tetapi tumbuh dari pengalaman historis mereka sendiri dalam menjaga laut, hutan, dan tanah adat mereka. Salah satu tokoh masyarakat, MK, menggambarkan bahwa sejak dahulu masyarakat Liang hidup berdampingan dengan alam, dan karena itu merasa bertanggung jawab atas kelestariannya. Dalam narasi ini, ekowisata bukanlah intervensi, melainkan ekstensi dari nilai yang sudah hidup lama. Ekowisata di Pantai Liang lebih tepat dipahami sebagai sebuah praktik sosial komunitas yang menghubungkan ekonomi, budaya, dan lingkungan dalam satu ekosistem nilai. Ini adalah bentuk pembaruan tradisi yang bukan hanya mempertahankan masa lalu, tetapi juga menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan komunitas lokal menyuarakan identitas dan mengartikulasikan masa depannya sendiri.

Pemuda sebagai Motor Inovasi dan Arah Baru Kepariwisata

Dalam lanskap sosial Pantai Liang yang terus mengalami pergeseran akibat tekanan pembangunan dan eksposur pariwisata, pemuda tampil sebagai aktor sentral yang menggerakkan arah baru dalam pengelolaan ekowisata komunitas. Mereka tidak hanya mengambil bagian sebagai tenaga kerja atau pelaksana teknis, tetapi juga sebagai perancang strategi, inovator, dan kurator narasi ekowisata yang berakar pada nilai-nilai lokal. Peran ini muncul secara organik, bukan karena penugasan institusional, melainkan sebagai respons terhadap tantangan lingkungan dan kebutuhan ekonomi yang dirasakan bersama oleh komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan salah satu pemuda lokal berinisial A.F, diketahui bahwa kelompok pemuda di Pantai Liang secara inisiatif membentuk tim kecil yang mereka sebut “media lingkungan.” Tim ini bertugas membuat konten visual dan narasi pendek tentang aktivitas komunitas yang berkaitan dengan konservasi pantai, pengolahan sampah, dan promosi wisata berbasis budaya. Konten-konten ini kemudian diunggah ke media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Mereka menyadari bahwa wisatawan

generasi muda mencari pengalaman yang “otentik” dan “bermakna,” dan media digital menjadi pintu masuk strategis untuk menjangkau mereka. Bagi A.F dan timnya, kegiatan ini bukan semata-mata tentang pemasaran, tetapi cara untuk “menunjukkan siapa kami dan bagaimana kami menjaga rumah kami.”

Hasil observasi lapangan yang dilakukan selama dua minggu pada Juni 2022 memperlihatkan aktivitas yang cukup intens dari para pemuda di Balai Pemuda Desa. Setiap sore, kelompok ini berkumpul untuk merencanakan unggahan media, menyunting video, dan mendiskusikan tanggapan dari warganet. Beberapa di antaranya bahkan membuat sketsa infografis tentang pentingnya memilah sampah plastik di kawasan wisata. Mereka menempelkan hasilnya di warung, dermaga, dan titik-titik transit wisatawan. Yang menarik, meskipun dilakukan dengan peralatan seadanya—kamera ponsel, laptop bekas, dan koneksi internet yang terbatas—kualitas kerja mereka cukup rapi dan narasi yang dibangun sangat komunikatif. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghalang untuk berinovasi; sebaliknya, keterbatasan itu menjadi ruang munculnya kreativitas khas pemuda desa.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Ávila-Foucat et al. (2021) dan Morgan & Winkler (2020) bahwa pemuda dalam konteks Global South tidak dapat semata-mata dilihat sebagai “harapan masa depan,” sebagaimana narasi pembangunan konvensional sering menggambarkan, melainkan sebagai subjek aktif yang membentuk masa kini secara taktis. Pemuda tidak hanya menunggu perubahan datang dari atas, tetapi justru mengintervensi struktur sosial dan sistem nilai yang ada melalui praktik-praktik kecil namun strategis. Di Pantai Liang, hal ini terwujud melalui digitalisasi narasi komunitas dan penyusunan sistem wisata yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekologis.

Kegiatan lain yang dikelola oleh kelompok pemuda adalah program edukasi lingkungan bagi anak-anak sekolah dasar. Program ini dilakukan setiap hari Jumat sore di aula terbuka pinggir pantai. Melalui permainan, dongeng, dan simulasi daur ulang, mereka menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga laut dan hutan mangrove. Seorang informan, D.M, menjelaskan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan mereka terhadap peningkatan volume sampah pasca-pandemi, sekaligus karena “tidak banyak orang dewasa yang punya waktu atau semangat untuk mengajarkan hal-hal ini.” Dengan demikian, pemuda mengambil peran sebagai penghubung antara generasi dan nilai, menyisipkan dimensi pedagogis dalam kerja ekowisata mereka.

Tak hanya dalam aspek edukasi dan media, kelompok pemuda juga terlibat langsung dalam penyusunan zonasi ekowisata di pantai, termasuk merancang jalur tracking mangrove, mendata titik-titik rawan erosi, serta membangun tempat sampah tematik dari bahan daur ulang. Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa peran mereka bukan sekadar “kreatif,” tetapi juga “strategis,” yakni membentuk infrastruktur dasar dari ekowisata komunitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Kummitha et al. (2021) yang menekankan bahwa pemuda memiliki kapasitas untuk menavigasi ruang-ruang transisi antara struktur dan agen, antara tradisi dan perubahan.

Keterlibatan pemuda juga mengindikasikan adanya pergeseran relasi kuasa di tingkat komunitas. Jika sebelumnya pengelolaan sumber daya dan kegiatan desa banyak bergantung pada tokoh adat atau perangkat desa, kini pemuda mulai mendapatkan legitimasi sosial sebagai aktor pengambil keputusan, terutama dalam isu lingkungan dan pariwisata. Dalam diskusi kelompok yang dilakukan dengan beberapa warga senior, muncul pengakuan bahwa pemuda “lebih tahu cara menghadapi wisatawan zaman sekarang,” dan bahwa mereka “punya energi dan pengetahuan yang bisa diandalkan.” Pengakuan ini menjadi penting sebagai basis sosial dari transformasi peran pemuda yang lebih otonom dan diakui secara kultural.

Namun demikian, peran pemuda tidak terlepas dari tantangan. Minimnya dukungan finansial, keterbatasan infrastruktur digital, dan kurangnya pengakuan formal dari institusi pemerintah kadang menjadi hambatan dalam memperluas dampak kerja mereka. Meski begitu, para pemuda ini tidak berhenti bergerak. Mereka membentuk jaringan informal dengan komunitas pemuda di desa lain dan menjalin kolaborasi dengan mahasiswa, LSM, dan traveler independen. Strategi jaringan ini mencerminkan apa yang disebut oleh Ghaderi et al. (2022) sebagai *spaces of engagement*—ruang di mana warga muda membentuk koalisi taktis di luar struktur formal untuk mencapai tujuan kolektif.

Perempuan sebagai Penjaga Nilai dan Penggerak Ekowisata Berbasis Budaya

Peran perempuan dalam praktik ekowisata berbasis komunitas di Pantai Liang tidak hanya penting, tetapi mendasar. Mereka menjadi penghubung antara budaya, lingkungan, dan generasi, dengan menjalankan fungsi-fungsi sosial yang melekat namun seringkali tersembunyi dari pandangan arus utama pembangunan wisata. Di tengah geliat promosi ekowisata yang sering kali menekankan estetika lanskap dan atraksi alam, kontribusi perempuan hadir dalam bentuk kerja-kerja perawatan (*care work*), kerja budaya, dan kerja ekologis yang membentuk fondasi keberlanjutan komunitas lokal.

Dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah perempuan penggerak ekowisata, tergambar bagaimana keterlibatan mereka sangat beragam. Salah satunya, NY, seorang ibu rumah tangga yang juga ketua kelompok pengolah pangan lokal, menyatakan bahwa dapur mereka bukan sekadar tempat memasak, tetapi juga ruang untuk “menjaga rasa Maluku.” Bersama lima anggota kelompoknya, NY secara rutin menyiapkan makanan berbasis hasil laut dan umbi-umbian lokal yang disajikan kepada wisatawan. Makanan ini tidak hanya menjadi konsumsi, tetapi juga bagian dari narasi budaya. Di sela-sela makan, para perempuan kerap bercerita tentang asal-usul resep, nama-nama lokal tumbuhan, atau kisah leluhur yang mengolah hasil laut dengan cara ramah lingkungan. Dari sini, terlihat bahwa perempuan memainkan peran ganda: sebagai penyedia layanan wisata dan sebagai penjaga memori kolektif.

Observasi lapangan yang dilakukan selama dua hari di rumah produksi kelompok perempuan tersebut memperlihatkan dinamika kerja yang sangat terorganisir namun tidak formal. Di ruang terbuka yang dibatasi dengan anyaman bambu, para ibu tampak bekerja sambil mengobrol ringan. Di pojok ruangan, anak-anak kecil bermain sambil sesekali

menirukan aktivitas ibu mereka. Aroma daun pala dan ikan asap memenuhi udara. Setiap proses—dari pemilihan bahan hingga penyajian—dilakukan dengan prinsip “jangan ada yang dibuang” sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Di dinding tergantung kalender kegiatan edukasi kuliner lokal untuk anak-anak, yang rutin dilakukan setiap bulan. Dalam satu sesi yang sempat diamati, seorang ibu menjelaskan kepada sekelompok anak wisatawan tentang bagaimana mengolah sagu lempeng secara tradisional dan bagaimana masyarakat dahulu mengambil sagu tanpa merusak pohonnya. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya terlibat dalam kerja ekonomi, tetapi juga dalam pendidikan lingkungan yang kontekstual.

Kontribusi perempuan juga terlihat dalam bidang kerajinan tangan. Di bawah koordinasi RL, perempuan paruh baya yang juga pengurus kelompok tenun lokal, komunitas perempuan menghasilkan produk seperti tas serat alam, dompet tempurung kelapa, dan kain tenun bergambar motif laut. Produk ini dijual tidak hanya sebagai suvenir, tetapi juga sebagai medium edukasi. Misalnya, setiap motif pada kain disertai keterangan naratif tentang makna simboliknya dalam kosmologi Maluku. Dalam wawancara, RL menjelaskan bahwa kain tenun dengan motif ombak melambangkan keseimbangan, dan pemakaiannya sering dikaitkan dengan upacara adat yang berhubungan dengan laut. Dengan cara ini, perempuan secara aktif terlibat dalam produksi pengetahuan budaya dan transmisi nilai ekologis kepada wisatawan.

Peran perempuan dalam konteks ini senada dengan pendapat Widiartanto et al. (2022) bahwa yang memandang perempuan bukan hanya sebagai korban atau simbol dalam wacana lingkungan, melainkan sebagai aktor politik ekologis yang memiliki strategi bertahan dan sistem pengetahuan tersendiri. Dalam masyarakat yang rentan terhadap tekanan pembangunan top-down, perempuan di Pantai Liang membentuk arena mikro di mana keberlanjutan dan keadilan sosial dinegosiasikan melalui praktik sehari-hari. Mereka tidak menuntut pengakuan dalam struktur formal, tetapi justru membentuk struktur sosial baru yang berbasis solidaritas, nilai spiritual, dan keterhubungan dengan alam.

Tabel 1. Aktivitas Perempuan dalam Ekowisata Berbasis Budaya di Pantai Liang

Aktivitas	Deskripsi	Fungsi Sosial & Budaya
Penyediaan Kuliner Lokal	Menyajikan makanan tradisional berbasis laut dan hasil kebun	Melestarikan resep dan pengetahuan lokal
Produksi Kerajinan Tangan	Membuat produk dari bahan alam: tempurung, daun lontar, serat pohon	Edukasi simbolik dan ekonomi komunitas
Narasi Lisan Budaya	Menceritakan sejarah pantai dan cerita rakyat kepada wisatawan	Pewarisan nilai, identitas kolektif
Edukasi Lingkungan	Mengajar anak-anak wisatawan dan lokal tentang alam dan budaya	Transmisi nilai ekologis lintas generasi
Perawatan Ruang Sosial	Menjaga kebersihan, estetika dan keteraturan ruang komunitas	Membangun kenyamanan dan estetika wisata

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2022

Dalam praktiknya, peran perempuan ini tidak selalu mudah dijalankan. Ada ketegangan antara peran domestik dan aktivitas publik, serta beban kerja ganda yang sering kali tidak diakui secara ekonomi maupun politik. Namun, yang menarik, para perempuan ini menyikapi peran ganda tersebut sebagai bentuk pengabdian terhadap komunitas dan alam. Mereka tidak menuntut untuk diakui secara formal, tetapi berpegang pada prinsip bahwa “kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?”—sebuah kalimat yang muncul berulang kali dalam wawancara informal dengan beberapa informan.

Jika ditarik ke dalam kerangka yang lebih luas, kerja perempuan ini juga merupakan bentuk ekofeminisme praksis, yakni aksi nyata yang menghubungkan resistensi terhadap kerusakan lingkungan dengan perjuangan atas pengakuan sosial dan keadilan kultural (Deason et al., 2022; Ghaderi et al., 2022). Perempuan di Pantai Liang tidak hanya menjaga nilai, tetapi juga menciptakan ruang baru di mana nilai-nilai tersebut dapat diteruskan, dibagikan, dan dijadikan dasar untuk membangun model wisata yang manusiawi dan berkelanjutan.

Resistensi Halus terhadap Eksternalisasi dan Kuasa Institusional

Di balik geliat pembangunan ekowisata berbasis komunitas di Pantai Liang, terselip dinamika sosial yang menunjukkan adanya bentuk resistensi halus terhadap kuasa eksternal dan logika institusional yang kerap mendominasi sektor pariwisata. Resistensi ini tidak hadir dalam bentuk demonstrasi terbuka atau penolakan masif, tetapi lebih sebagai sikap sehari-hari—terwujud dalam pilihan komunitas untuk menjaga kontrol atas ruang, narasi, dan praktik wisata yang mereka kelola. Ini merupakan bentuk perlawanan yang bersifat senyap namun strategis, sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott (1985) dalam konsep *everyday resistance*, dan diperluas secara kontemporer oleh Lilja dan Vinthagen (2020) sebagai bentuk tindakan sosial mikro yang tidak selalu disadari sebagai “perlawanan,” tetapi sesungguhnya berfungsi sebagai upaya mempertahankan otonomi komunitas dari dominasi luar.

Salah satu contoh konkret resistensi ini terlihat dalam respons komunitas terhadap rencana pembangunan resort eksklusif oleh investor dari luar Maluku yang mengincar lahan pesisir Liang pada tahun 2020. Meski tawaran investasi itu sempat didukung oleh sebagian kecil perangkat desa, mayoritas warga secara kolektif menolak dengan cara yang tidak konfrontatif. Mereka tidak menggelar aksi protes atau membuat petisi, tetapi memilih untuk memperkuat sistem pengelolaan wisata yang sudah berjalan secara mandiri. Dalam wawancara dengan YR, seorang tokoh pemuda setempat, ia mengungkapkan bahwa komunitas “lebih percaya pada kekuatan sendiri” dan tidak ingin wisatawan datang hanya untuk tinggal di dalam resort tertutup tanpa berinteraksi dengan masyarakat. Menurutnya, “kalau hanya tidur di hotel dan makan di restoran yang tidak dikelola warga, buat apa mereka datang?”

Penolakan terhadap pembangunan resort itu diperkuat dengan cara memperbanyak ruang-ruang komunitas yang dapat menampung wisatawan secara langsung, seperti homestay, warung kelautan, serta jalur ekowisata berbasis edukasi. Observasi lapangan yang

dilakukan di kawasan pesisir bagian timur Pantai Liang menunjukkan adanya aktivitas kolektif warga yang secara sukarela membersihkan jalur pesisir dan membangun gazebo sederhana dari bambu. Gazebo ini, yang mereka sebut sebagai rumah singgah alam, tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai titik informasi wisata. Tidak ada sponsor besar di balik pembangunan ini. Semua bahan diperoleh dari sumbangan warga dan hasil daur ulang. Dalam satu kesempatan, peneliti menyaksikan kelompok pemuda dan ibu-ibu bekerja bersama hingga sore hari sambil menyanyikan lagu daerah, menunjukkan bahwa kerja ini bukan hanya bersifat teknis tetapi sarat makna simbolik dan emosional.

Tindakan-tindakan semacam ini merupakan bentuk kontrol narasi, sebagaimana dijelaskan oleh Pasanchay & Schott (2021), yaitu bagaimana komunitas lokal merebut kembali kuasa atas bagaimana tempat mereka dibayangkan dan dipraktikkan. Dengan memperkuat narasi wisata berbasis budaya dan keterlibatan komunitas, warga Liang secara tidak langsung membentuk batas terhadap intervensi luar yang bersifat komersial dan homogen. Alih-alih melarang secara eksplisit, mereka menciptakan alternatif yang lebih “masuk akal” dan lebih berakar pada nilai lokal. Ini adalah strategi kultural yang penuh dengan kecerdasan sosial—sebuah bentuk soft resistance yang tidak menciptakan konflik, tetapi tetap mempertahankan kendali komunitas atas ruang hidup mereka.

Dalam wawancara dengan WN, seorang perempuan pengrajin lokal, ia menuturkan bahwa “kami takut kalau nanti ada resort besar, anak-anak kami tidak bisa lagi bermain di pantai karena sudah jadi milik orang lain.” Pernyataan ini mencerminkan bentuk resistensi yang berbasis pada ingatan kolektif dan kekhawatiran akan hilangnya akses publik terhadap ruang alam yang selama ini menjadi bagian dari identitas komunitas. Perempuan seperti WN tidak bicara tentang “privatisasi” atau “eksploitasi” dalam bahasa akademik, tetapi pengalaman dan ketakutan mereka menyiratkan bentuk nyata dari perebutan ruang—yang menjadi inti dari debat dalam geografi kritis dan studi ruang publik (Nutsugbodo & Mensah, 2020).

Strategi lain yang digunakan warga Liang adalah dengan memperkuat institusi adat sebagai payung pengelolaan sumber daya alam. Meski secara formal tidak tercantum dalam sistem pemerintahan, struktur adat tetap memiliki posisi kuat dalam menentukan batas wilayah, aturan pemanfaatan pantai, dan tata cara interaksi dengan alam. Dalam diskusi kelompok terbatas dengan tokoh adat AK, terungkap bahwa kawasan tertentu di pesisir telah dinyatakan sebagai zona larangan pembangunan fisik berdasarkan nilai-nilai kultural yang diwariskan turun-temurun. Zona ini disebut sebagai tanah petuanan laut, yang secara adat tidak boleh diperjualbelikan. Dengan mengaktifkan kembali struktur nilai seperti ini, komunitas tidak hanya menjaga wilayahnya dari ancaman kapitalisasi, tetapi juga merevitalisasi identitas kolektif yang selama ini dilupakan oleh kerangka hukum formal.

Resistensi komunitas di Pantai Liang memperlihatkan bahwa tindakan perlawanan tidak harus hadir dalam bentuk oposisi terbuka. Mereka tidak menolak pembangunan, tetapi menegosiasikannya melalui cara mereka sendiri—yakni dengan memperkuat kapasitas lokal, memelihara keterhubungan dengan alam, dan memperluas partisipasi komunitas. Dengan

begitu, resistensi yang mereka bangun bersifat transformatif, karena tidak hanya mempertahankan status quo, tetapi menciptakan ruang baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan oleh Kunjuran et al. (2022), “resistensi sehari-hari bukan tentang mengalahkan kekuasaan, tetapi tentang menghindari penaklukan total oleh sistem.” Dan di Pantai Liang, resistensi itu hidup dalam bentuk narasi, dalam jalur tracking bambu, dalam masakan laut di warung kecil, dan dalam suara tawa anak-anak yang tetap bisa bermain bebas di pantai mereka sendiri.

Rekonstruksi Identitas dan Solidaritas Sosial Berbasis Lingkungan

Di Pantai Liang, ekowisata tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi atau strategi konservasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial tempat komunitas membentuk ulang siapa mereka dan bagaimana mereka hidup bersama. Dalam proses ini, terbentuk sebuah identitas kolektif baru yang bersumber dari keterhubungan emosional terhadap alam, nilai-nilai budaya lokal, dan pengalaman bersama dalam merawat lingkungan. Identitas ini bukan produk dari kebijakan luar atau slogan promosi wisata, melainkan tumbuh perlahan melalui praktik keseharian yang melibatkan banyak tangan dan hati—dari pemuda yang menanam mangrove hingga ibu-ibu yang mengajarkan anak-anak tentang pentingnya laut yang bersih.

Proses pembentukan identitas kolektif ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut Kunjuran (2022) sebagai *ecological belonging*, yaitu bentuk keterikatan sosial dan emosional terhadap tempat yang tidak hanya berbasis fungsi, tetapi juga memuat makna etis dan historis. Di Liang, keterikatan ini tercermin dalam narasi warga yang secara konsisten menyebut laut sebagai “tempat hidup,” “tempat belajar,” bahkan “rumah ketiga setelah Tuhan dan keluarga.” Dalam wawancara tidak langsung, YS, seorang tokoh adat, menyebut bahwa menjaga laut dan hutan bakau bukanlah kewajiban, tapi “bagian dari menjadi orang Liang.” Ungkapan ini mengandung lapisan identitas kultural yang dalam, di mana ekologi bukan sekadar ruang fisik tetapi juga ruang moral dan spiritual.

Observasi lapangan yang dilakukan pada awal Juni 2022 mengungkap bagaimana ruang-ruang sosial baru terbentuk di sekitar aktivitas ekowisata. Salah satu contohnya adalah Pos Mangrove yang dibangun dari kayu sisa dan beratap daun rumbia di sisi timur pantai. Di tempat ini, setiap sore warga berkumpul untuk berdiskusi tentang jadwal kegiatan, mendengarkan cerita dari tokoh tua, atau sekadar menikmati matahari terbenam bersama pengunjung. Tidak ada struktur formal yang mengatur kegiatan ini, namun atmosfernya sangat kolektif. Anak-anak bermain sambil mengamati kepiting bakau, pemuda berdiskusi sambil memperbaiki papan informasi, dan para ibu sesekali membawa panganan lokal untuk dibagi bersama. Ruang ini menjadi titik temu antar generasi dan kelas sosial dalam komunitas, tempat di mana keterlibatan lingkungan dibingkai dalam semangat kebersamaan dan kesetaraan.

Kebersamaan ini tidak hadir begitu saja, tetapi merupakan hasil dari pengalaman kolektif menghadapi krisis lingkungan dan ketimpangan pembangunan. Dalam diskusi kelompok terbatas, beberapa warga menyatakan bahwa mereka dulu merasa terpinggirkan

ketika pembangunan pariwisata hanya menguntungkan segelintir orang. Namun sejak pengelolaan ekowisata berbasis komunitas dijalankan, rasa memiliki terhadap ruang publik dan alam sekitar mulai tumbuh. “Kami merasa punya peran. Pantai ini bukan milik orang luar, tapi bagian dari hidup kami,” ujar LR, seorang guru sekolah dasar yang juga aktif dalam edukasi lingkungan anak-anak. Ungkapan ini menandai transformasi penting dalam dinamika sosial komunitas, di mana ekowisata menjadi medium aktualisasi identitas sebagai penjaga, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Proses ini menunjukkan bagaimana kategori “kami” dibentuk dan dikuatkan melalui relasi dengan “mereka”—dalam hal ini, aktor eksternal yang dianggap kurang memahami nilai lokal dan etika ekologis komunitas. Namun, dibanding menciptakan oposisi biner, warga Liang justru memperluas solidaritas mereka dengan mengajak wisatawan untuk ikut serta dalam kegiatan lingkungan. Kegiatan seperti tanam mangrove bersama, gotong royong membersihkan pantai, hingga pementasan seni lokal untuk edukasi ekowisata adalah bentuk keterlibatan yang melampaui sekadar transaksi wisata. Praktik ini mengindikasikan terbentuknya solidaritas lintas batas, di mana wisatawan juga dianggap sebagai bagian dari “kami” selama mereka menghormati nilai-nilai lokal.

Temuan ini sejalan dengan gagasan Zhang et al. (2021), yang menyatakan bahwa identitas kolektif berbasis lingkungan tidak hanya dibentuk oleh kesamaan geografis, tetapi juga oleh praktik bersama dalam menjaga keberlanjutan. Solidaritas semacam ini bersifat cair namun kuat, dibentuk bukan oleh formalitas organisasi, melainkan oleh pengalaman bersama dan nilai-nilai yang terus dinegosiasikan. Di Liang, solidaritas ini terlihat dalam cara komunitas mengatur zonasi pantai secara partisipatif, membagi peran berdasarkan kemampuan, dan saling menguatkan ketika menghadapi tantangan, termasuk ketika terjadi abrasi besar pada awal 2020.

Yang menarik, proses rekonstruksi identitas ini juga menciptakan bentuk ekspresi budaya baru. Dalam satu sesi pertunjukan seni yang digelar secara swadaya di tepi pantai, para pemuda menampilkan tarian tradisional dengan tambahan narasi modern tentang pentingnya daur ulang sampah. Musik yang mengiringi menggabungkan alat musik bambu dengan rekaman suara ombak dan burung laut. Ini bukan sekadar pertunjukan, tetapi bentuk artikulasi identitas yang menggabungkan tradisi dan kesadaran ekologis kontemporer. Artikulasi semacam ini merupakan apa yang disebut oleh Wikantiyoso et al. (2021) sebagai identitas yang bersifat performatif dan terus berubah, dibentuk melalui proses historis, sosial, dan kultural.

Ekowisata di Pantai Liang telah menjelma menjadi arena rekonstruksi sosial yang kompleks dan dinamis. Ia bukan hanya tentang perjalanan ke suatu tempat, tetapi tentang perjalanan komunitas dalam memahami, menjaga, dan menegosiasikan siapa mereka di tengah perubahan zaman. Identitas sebagai “masyarakat pesisir Maluku” diperkuat bukan hanya melalui bahasa atau adat, tetapi melalui aksi kolektif yang menjadikan lingkungan sebagai pusat dari kehidupan sosial. Dalam ruang ini, keberlanjutan bukan sekadar tujuan ekologis, tetapi juga tujuan sosial dan kultural—yakni mempertahankan kebermaknaan hidup

bersama, dalam solidaritas, dan dalam keberlanjutan yang dimaknai secara lokal.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda dan perempuan di Pantai Liang bukan sekadar pelaku pelengkap dalam praktik ekowisata berbasis komunitas, melainkan aktor sentral yang secara aktif memproduksi ruang sosial dan kultural baru melalui aksi lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Mereka mengintervensi struktur relasi kuasa yang selama ini cenderung didominasi oleh aktor eksternal, dan secara strategis mengartikulasikan nilai-nilai ekologis, solidaritas sosial, dan identitas kultural dalam pengelolaan wisata. Melalui kerja-kerja senyap namun terstruktur—dari produksi konten lingkungan digital, edukasi lintas generasi, hingga penguatan praktik adat—muncul bentuk mobilisasi sosial yang berakar pada agensi lokal, sekaligus menegosiasikan arah pembangunan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini mengukuhkan bahwa wilayah-wilayah perifer seperti Maluku bukan hanya lokasi penerapan kebijakan, tetapi juga pusat produksi pengetahuan sosial yang khas dan kontekstual. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menjawab tujuan penelitian tentang bagaimana peran strategis kelompok lokal dijalankan dalam ekowisata, tetapi juga memperluas pemahaman tentang pembangunan alternatif yang digerakkan dari bawah—di mana nilai, peran gender, dan ekologi hidup berdampingan dalam kerangka keadilan sosial dan keberlanjutan budaya.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, M. D. P., Budhi, M. K. S., Utama, M. S., & Yasa, I. G. W. M. (2019). The influence of government role, community participation and social capital on the quality of destination and community welfare in the tourism village of Badung Regency Province of Bali. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 92(8), 235–251. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-08.26>

- Ávila-Foucat, V. S., Revollo-Fernández, D., & Navarrete, C. (2021). Determinants of Livelihood Diversification: The Case of Community-Based Ecotourism in Oaxaca, Mexico. *Sustainability*, 13(20), 11371. <https://doi.org/10.3390/su132011371>
- Bourdieu, P. (2018). Structures, Habitus, Practices. In *Rethinking the Subject* (pp. 31–45). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429497643-2>
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah. *Sustainability*, 13(23), 13–30. <https://doi.org/10.3390/su132313302>
- Cheng, T.-M., Wu, H. C., Wang, J. T.-M., & Wu, M.-R. (2019). Community Participation as a mediating factor on residents' attitudes towards sustainable tourism development and their personal environmentally responsible behaviour. *Current Issues in Tourism*, 22(14), 1764–1782. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1405383>
- Deason, G., Seekamp, E., & Barbieri, C. (2022). Actor-network theory and organizational resilience to climate change in community-based tourism. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 38, 100483. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100483>
- Demolinggo, R. H., Damanik, D., Wiweka, K., & Adnyana, P. P. (2020). Sustainable tourist villages management based on Javanese local wisdom “Memayu Hayuning Bawono” best practice of Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta. *International Journal of Tourism & Hospitality Reviews*, 7(2), 41–53. <https://doi.org/10.18510/ijthr.2020.725>
- Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. *Current Issues in Tourism*, 21(13), 1547–1568. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1150257>
- Ghaderi, Z., Elham, S., David, F., & and Khoshkam, M. (2022). Increasing community environmental awareness, participation in conservation, and livelihood enhancement through tourism. *Local Environment*, 27(5), 605–621. <https://doi.org/10.1080/13549839.2022.2048812>
- He, S., Yang, L., & Min, Q. (2020). Community Participation in Nature Conservation: The Chinese Experience and Its Implication to National Park Management. *Sustainability*, 12(11), 4760–4766. <https://doi.org/10.3390/su12114760>
- Hengky, H. (2018). Discerning Coastal Ecotourism in Bira Island. *International Journal of Marine Science*, 8(6), 336–347. <https://doi.org/10.5376/ijms.2018.08.0006>
- Idziak, W., Majewski, J., & Zmysłony, P. (2018). Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland. In *Rural Tourism* (pp. 209–230). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315111865-11>
- Jackson, J. B. (2021). The vernacular landscape. In *Landscape Meanings and Values* (pp. 65–81). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003270270-5>
- Khan, N. I. (2019). Case Study as a Method of Qualitative Research. In *Qualitative techniques for workplace data analysis* (pp. 170–196). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5366-3.ch008>
- Kia, Z. (2021a). Ecotourism in Indonesia: Local Community Involvement and The Affecting Factors. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(2), 93–105. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.10789>
- Kia, Z. (2021b). Ecotourism in Indonesia: Local Community Involvement and The Affecting Factors. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(2), 100–112.

<https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.10789>

- Kummitha, H. R., Kolloju, N., Jancsik, A., & Szalók, Z. C. (2021). Can Tourism Social Entrepreneurship Organizations Contribute to the Development of Ecotourism and Local Communities: Understanding the Perception of Local Communities. *Sustainability*, 13(19), 11031. <https://doi.org/10.3390/su131911031>
- Kunjuraman, V. (2022). Community-based ecotourism managing to fuel community empowerment? An evidence from Malaysian Borneo. *Tourism Recreation Research*, 47(4), 384–399. <https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1841378>
- Kunjuraman, V., Hussin, R., & Aziz, R. C. (2022). Community-based ecotourism as a social transformation tool for rural community: A victory or a quagmire? *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 39, 100524. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100524>
- Majid Cooke, F., & Acciaioli, G. (2021). Positioning Bajau Identities as Bumiputera: Challenges and Potentials of Leveraging Environmental Justice and Espousal of Islam in Sabah, Malaysia. In *Discourses, Agency and Identity in Malaysia: Critical Perspectives* (pp. 153–181). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4568-3_6
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>
- Morgan, M. S., & Winkler, R. L. (2020). The Third Shift? Gender and Empowerment in a Women's Ecotourism Cooperative. *Rural Sociology*, 85(1), 137–164. <https://doi.org/10.1111/ruso.12275>
- Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2019). Tourism, community-based tourism and ecotourism: a definitional problematic. *South African Geographical Journal*, 101(1), 22–35. <https://doi.org/10.1080/03736245.2018.1522598>
- Nutsugbodo, R. Y., & Mensah, C. A. (2020). Benefits and barriers to women's participation in ecotourism development within the Kakum Conservation Area (Ghana): Implications for community planning. *Community Development*, 51(5), 685–702. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1825977>
- Osman, T., Shaw, D., & Kenawy, E. (2018). Examining the extent to which stakeholder collaboration during ecotourism planning processes could be applied within an Egyptian context. *Land Use Policy*, 78(2), 126–137. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.043>
- Pasanchay, K., & Schott, C. (2021). Community-based tourism homestays' capacity to advance the Sustainable Development Goals: A holistic sustainable livelihood perspective. *Tourism Management Perspectives*, 37, 100784. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100784>
- Prasetyo, N., Carr, A., & Filep, S. (2020). Indigenous Knowledge in Marine Ecotourism Development: The Case of Sasi Laut , Misool, Indonesia. *Tourism Planning & Development*, 17(1), 46–61. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1604424>
- Priatmoko, S., Kabil, M., Purwoko, Y., & Dávid, L. D. (2021). Rethinking Sustainable Community-Based Tourism: A Villager's Point of View and Case Study in Pampang Village, Indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3245. <https://doi.org/10.3390/su13063245>
- Priya, A. (2021). Case Study Methodology of Qualitative Research: Key Attributes and Navigating the Conundrums in Its Application. *Sociological Bulletin*, 70(1), 94–110.

<https://doi.org/10.1177/0038022920970318>

- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18(1), 9–16. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Rembulan, C. L., Helmi, A. F., & Riyono, B. (2020). The fluid power: constructing the concept of power in community-based tourism in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 14(4), 515–537. <https://doi.org/10.1108/JEC-03-2020-0041>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Prabowo, A., Kumalasari, K., Galih, A. P., & Wismanu, R. E. (2021). Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development in Indonesia: Case Study from Batu City East Java Province. *Journal of Government and Civil Society*, 5(2), 214–236. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4420>
- Singgalen, Y. A. (2020). Mangrove Forest Utilization for Sustainable Livelihood through Community-Based Ecotourism in Kao Village of North Halmahera District. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 26(2), 155–168. <https://doi.org/10.7226/jtjm.26.2.155>
- Singgalen, Y. A., & Timisela, M. (2021). *Tourism SME's competitive advantages through ICT based community: the role of genpi in eastern Indonesia*.
- Sobhani, P., Esmaeilzadeh, H., Sadeghi, S. M. M., Wolf, I. D., & Deljouei, A. (2022). Relationship Analysis of Local Community Participation in Sustainable Ecotourism Development in Protected Areas, Iran. *Land*, 11(10), 1871. <https://doi.org/10.3390/land11101871>
- Suaedi, F., & Widiono, G. W. (2017). Collaborative Community Empowerment Model to Improve the Living Quality of Poor People - Case Study on "Down-Syndrome Village" in Ponorogo Regency. *2nd International Conference on Sociology Education*, 362–366. <https://doi.org/10.5220/0007098403620366>
- Sugito, T., Sulaiman, A. I., Sabiq, A., Faozanudin, M., & Kuncoro, B. (2019). The Empowerment as Community Learning Based on Ecotourism of Coastal Border at West Kalimantan. *International Educational Research*, 2(3), p23. <https://doi.org/10.30560/ier.v2n3p23>
- Syamsi, M. N., & Lee, J. (2021). A Longitudinal Study of the Local Community Perspective on Ecotourism Development in Lombok, Indonesia. *Water*, 13(17), 23–38. <https://doi.org/10.3390/w13172398>
- Tseng, M.-L., Lin, C., Remen Lin, C.-W., Wu, K.-J., & Sriphon, T. (2019). Ecotourism development in Thailand: Community participation leads to the value of attractions using linguistic preferences. *Journal of Cleaner Production*, 231(12), 1319–1329. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.305>
- Widiartanto, Wahyudi, F. E., Santoso, R. S. S., & Priyotomo. (2022). Role of Social Capital in Community Based Ecotourism: A Case of Batang District, Central Java, Indonesia. *Research Horizon*, 2(5), 511–531. <https://doi.org/10.54518/rh.2.5.2022.511-531>
- Widjojo, H., & Gunawan, S. (2020). Indigenous Tradition: An Overlooked Encompassing-Factor in Social Entrepreneurship. *Journal of Social Entrepreneurship*, 11(1), 88–110. <https://doi.org/10.1080/19420676.2019.1579752>
- Wikantiyoso, R., Cahyaningsih, D. S., Sulaksono, A. G., Widayati, S., Poerwoningsih, D., & Triyosoputri, E. (2021). Development of Sustainable Community-Based Tourism in Kampong Grangsil, Jambangan Village, Dampit District, Malang Regency. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 9(1), 64–77.

https://doi.org/10.14246/irspsd.9.1_64

- Wiweka, K., H. Demolingo, R., Karyatun, S., Pramania Adnyana, P., & Nurfikriyani, I. (2021). Tourist Village Rejuvenation and Overtourism Management: The Desa Wisata Nglanggeran Lifecycle Experience, Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Tourism & Hospitality Reviews*, 8(1), 01–16. <https://doi.org/10.18510/ijthr.2021.811>
- Zhang, Y., Xiong, Y., Lee, T. J., Ye, M., & Nunkoo, R. (2021). Sociocultural Sustainability and the Formation of Social Capital from Community-based Tourism. *Journal of Travel Research*, 60(3), 656–669. <https://doi.org/10.1177/0047287520933673>
- Zoysa, M. De. (2022). Forest-Based Ecotourism in Sri Lanka: A Review on State of Governance, Livelihoods, and Forest Conservation Outcomes. *Journal of Sustainable Forestry*, 41(3–5), 413–439. <https://doi.org/10.1080/10549811.2021.1943450>